

**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM SENGKETA
KEPULAUAN SENKAKU/DIAOYU PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

WA ODE ELSA MARDANI

E061181004

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM SENGKETA
KEPULAUAN SENKAKU/DIAOYU PADA MASA
Pemerintahan Presiden Barack Obama dan
Donald Trump

NAMA : WA ODE ELSA MARDANI

NIM : E061181004

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 10 April 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM SENGKETA
KEPULAUAN SENKAKU/DIAOYU PADA MASA
Pemerintahan Presiden Barack Obama dan
DONALD TRUMP

NAMA : WA ODE ELSA MARDANI

NIM : E061181004

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 20 Maret 2023.

TIM EVALUASI

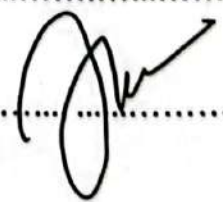
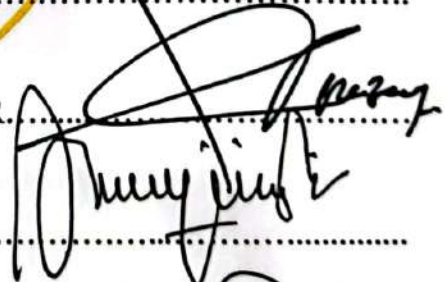
Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Elsa Mardani

NIM : E061181004

Jenjang :S1

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:
**“Kepentingan Amerika Serikat Dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu
Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

ssar, 18 April 2023

Wa Ode Elsa Mardani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepentingan Amerika Serikat Dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Phill. Sukri, M.Si. dan seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D, sekaligus selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. H.M. Imran Hanafi, MA.,M.Ec., Drs. Aspianor Masrie, M.Si, Dra St. Nurcahaya, Sm, Hk. M.Si, Dr. Adi Suryadi B., MA., Drs. H. Husein Abdullah, M.Si., Dra. Srie Honora Ramli, M.A., Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Burhanuddin,S.IP, M.Si., Agussalim, S.IP., MIRAP., Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Nur isdah, S.IP., MA., Nurjannah Abdullah, S.IP.,MA., Bama Andika Putra, S.IP., MIR., Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR sebagai Dosen Dapartemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberi ilmu dan juga pengalaman yang berharga.
6. Kedua orangtua (Bapak La Ode Dani dan Ibu Mirna), Kakak Tesar, Kakak Lisa, Adik Salsa, dan Adik Annisah, yang senantiasa memberikan dukungan moril tiada henti-hentinya.
7. BIT7CHES Squad yang terdiri dari orang-orang luar biasa dan di luar nalar, Andri, Nisa, Pia, Ade, Shamad, dan Aat, serta “orang lain” Kak Amran dan Kak Arya sebagai teman seperjuangan selama mengenyam pendidikan di Makassar dengan berbagai lika-liku anak rantau yang diselingi dengan berbagai lawakan, hiburan, drama, serta berbagai bantuan-bantuan yang tidak dapat dihitung lagi.
8. Nipah Gurl yang walaupun sulit sekali diajak ke Nipah karena berbagai halangan yang menerjang. Al, Raisa, Dillah, Eki terima kasih atas dukungan

dan bantuannya selama ini yang tak terhingga, utamanya sudah mengisi keseharian Penulis selama bangku perkuliahan.

9. Nahda, Nabilah, Cece, Asria, Safwan, Rhin, Lute, Rina, Wiwi, Ainun, Astrid, Sule, Munif, Nanda serta teman-teman REFORMA yang telah memberikan dukungan dan info-info tambahan terkait kelancaran penulisan skripsi ini, serta mengisi keseharian Penulis selama bangku perkuliahan.
10. Amran Muafa Najib si paling beda dimensi tapi selalu ada meskipun sulit dihubungi berasa artis papan atas, terima kasih dukungan dan hiburannya selama ini, utamanya di masa-masa krisis, tertekan, tertampar, lemah, letih, lesuh, lunglai, luv ya, saat penyusunan skripsi ini. Semoga cepat nyusul dan diberi kelancaran untuk ke depannya. Gas pol lah, saya di sini dengan senang hati siap membantu, hehe.
11. Kawan-kawan ICUNISM, Ompi, Eki Zainudin, Bells, Ika, Anisah, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Mas F yang menemani Penulis sejak awal perkuliahan yang berakhir pula dukungannya bersamaan dengan berakhirnya masa Penulis mengenyam pendidikan perkuliahan karena puji syukur Penulis bisa 'tetap bertahan dan membanggakan'. Terima kasih sudah menemani selama ini meskipun diakhir malah justru menciptakan impresi yang kurang mengenakkan, semoga skripsinya juga bisa lancar.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver.*

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

ABSTRAK

Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur antara Jepang dan China belum mendapatkan titik terang hingga saat ini. Jepang dan China masing-masing mengajukan pengklaimannya untuk memenuhi ambisi mereka dalam memiliki Kepulauan Senkaku/Diaoyu karena diketahui kepulauan tersebut menyimpan potensi sumber daya minyak dan perikanan yang melimpah. Di bawah kerangka *Japan-U.S. Security Treaty*, Amerika Serikat pun ikut terlibat dalam persengketaan ini sebagai penyedia payung keamanan bagi Jepang apabila sewaktu-waktu Jepang mendapatkan serangan dari China terkait konflik yang tengah terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika sikap Amerika Serikat terhadap Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen dan studi literatur/studi kepustakaan yang dianalisa secara mendetail dan mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersamaan dengan meningkatnya tensi atas konflik tersebut, Barack Obama dan Donald Trump sama-sama menyatakan dukungannya kepada Jepang untuk melawan China dengan berbagai kebijakan-kebijakan utamanya di bidang militer. Selain itu, sikap yang diambil oleh Obama dan Trump memiliki perbedaan yaitu dari segi pengambilan sikap yang terkadang mempertahankan netralitas namun di sisi lain bersih keras siap untuk mendukung Jepang. Dalam menilai posisi Amerika Serikat tersebut, Penulis menemukan bahwa adanya agenda kepentingan nasional di kawasan yang berusaha di wujudkan oleh Amerika Serikat.

Kata Kunci: Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu, Amerika Serikat, China, Jepang, Aliansi Keamanan AS-Jepang

ABSTRACT

The Senkaku/Diaoyu Islands dispute in the East China Sea between Japan and China has not yet come to light. Japan and China each submitted their claims to fulfill their ambitions in owning the Senkaku/Diaoyu Islands because it is known that these islands hold abundant potential for oil and fishery resources. Under the framework of Japan-U.S. Security Treaty, the United States was also involved in this dispute as a security umbrella provider for Japan if at any time Japan received an attack from China related to the ongoing conflict.

This study aims to determine the interests of the United States in the Senkaku/Diaoyu Islands dispute during the administration of President Barack Obama and Donald Trump and what factors influenced the dynamics of the United States' attitude towards Japan in the Senkaku Islands dispute. This study uses a descriptive qualitative method, namely by using document study techniques and literature studies/library studies which are analyzed in detail and depth.

The results of this study indicate that along with the increasing tension over the conflict, Barack Obama and Donald Trump both expressed their support for Japan to fight China with various policies primarily in the military field. In addition, the stances taken by Obama and Trump have differences, namely in terms of taking a stance that sometimes maintains neutrality but on the other hand is ready to support Japan. In assessing the position of the United States, the author finds that there is an agenda of national interests in the region that the United States is trying to realize.

Keywords: *Senkaku/Diaoyu Islands Dispute, United States of America, China, Japan, US-Japan Security Treaty*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Kepentingan Nasional.....	10
2. Konsep Aliansi	14
3. Konsep <i>Umbrella Security</i>	17
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kepentingan Nasional.....	22
B. Aliansi	26
C. <i>Umbrella Security</i>	31
D. Penelitian Terdahulu	34

BAB III GAMBARAN UMUM.....	36
A. Hubungan Keamanan Amerika Serikat-Jepang.....	36
1. Sejarah Aliansi Keamanan Amerika Serikat dan Jepang.....	36
2. <i>San Fransisco Treaty</i>	40
3. <i>Japan-U.S. Security Treaty</i>	42
4. Hubungan Keamanan AS-Jepang Pada Masa Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.....	44
B. Sejarah Konflik Senkaku	50
1. Latar Belakang Sejarah	50
2. Pengklaiman Kepulauan Senkaku.....	59
3. Eskalasi Konflik.....	68
C. Kepentingan Jepang dalam Konflik Senkaku	79
D. Hubungan Jepang-China dalam Konflik Senkaku.....	82
1. Bidang Politik	82
2. Bidang Ekonomi	86
3. Bidang Sosial Budaya	87
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	90
A. Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Senkaku/Diaoyu Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump	90
1. Dukungan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama	95
2. Dukungan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump.....	108
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sikap Dukungan Amerika Serikat Terhadap Jepang dalam Konflik Senkaku.....	120
1. Ancaman Hegemoni China di Kawasan Asia	122
2. Pertimbangan Hubungan AS-China.....	129
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	8
Bagan 2. Kerangka Konseptual Penelitian.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Timeline</i> Hubungan Keamanan Jepang-AS	44
Tabel 2. Status Kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu.....	53
Tabel 3. Jumlah Scrambling oleh ASDF Terhadap Pesawat Asing China	74
Tabel 4. <i>Timeline</i> Eskalasi Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu	76
Tabel 5. Strata Eksekutif <i>Alliance Coordination Mechanism</i>	105
Tabel 6. Perbedaan Sikap Dukungan AS Terhadap Jepang.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kepulauan Senkaku.....	51
Gambar 2. Area Lingkup Kepulauan Senkaku	51
Gambar 3. Detail Lokasi Kepulauan Senkaku	52
Gambar 4. Jumlah Kapal China yang Masuk di Perairan Kepulauan Senkaku	72
Gambar 5. Peta Teritorial Aktivitas Kapal.....	72
Gambar 6. <i>Air Defense Identification Zones</i>	73
Gambar 7. Peta Ladang Gas Chunxido.....	81
Gambar 8. Pengeluaran Anggaran Pertahanan di Indo-Pasifik.....	123
Gambar 9. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi AS-China	125
Gambar 10. Perdagangan Jasa AS-China	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda tiap negara. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut saling berbenturan satu sama lain sehingga dunia internasional tidak pernah luput dari konflik. Salah satu konflik yang kerap terjadi yaitu terkait kedaulatan wilayah seperti yang terjadi antara Jepang dan China atas perebutan status kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur. Perseteruan tersebut akhirnya membuat Amerika Serikat ikut terlibat dengan mengambil langkah untuk memihak di sisi Jepang.

Awal mula konflik ini terjadi pada 14 Januari 1895 yang masih berlangsung hingga saat ini yaitu ketika Jepang mengumumkan secara resmi kepemilikan Kepulauan Senkaku dengan alasan untuk memperluas wilayah teritorial pada saat perang China-Jepang di mana Jepang menang atas China (Roza, 2012). Kemudian Jepang pun membuat tanda di kepulauan tersebut sebagai tanda kepemilikan Jepang.

Secara resmi persengketaan ini mulai terjadi pada 17 Juli 1970 ketika duta besar Jepang di Taipei mengirimkan nota kepada Kementerian Luar Negeri China untuk menegaskan kedaulatan Jepang atas kepulauan tersebut dan menyatakan bahwa klaim uniteral dari pemerintah China atas kepulauan Senkaku dan landas

kontinennya tidak sah menurut hukum internasional (Shaw, 1999). China menentang hal tersebut setelah mulai mengetahui potensi sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan Senkaku.

Salah satu dasar yang membuat Jepang yakin untuk melakukan pengklaiman Kepulauan Senkaku adalah mengacu pada Perjanjian Fransisco antara Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1951. Perjanjian tersebut memuat banyak hal terkait ‘warisan wilayah’ berakhirnya Perang Dunia II yang dipindahtangankan kepada Jepang. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku termasuk dalam wilayah yang hak administratifnya dikembalikan ke Jepang yaitu Kepulauan Ryukyu (Nansei Shoto) dan Kepulauan Daito (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016). Di mana Jepang menganggap Kepulauan Senkaku menjadi bagian dari Nansei Shoto yang dimaksudkan dalam pasal perjanjian tersebut.

Di sisi lain China juga memiliki landasan mengapa Kepulauan Senkaku merupakan wilayah kedaulatannya. Salah satunya yaitu China beranggapan bahwa Kepulauan Senkaku telah lama menjadi bagian dari Taiwan yang dirampas oleh Jepang berdasarkan Perjanjian Shimonoseki pada akhir Perang Jepang-Tiongkok Pertama pada tahun 1895. Isi dari perjanjian Shimonoseki yaitu keharusan China menyerahkan sebagian wilayahnya ke Jepang, di mana Taiwan dan Senkaku adalah satu kesatuan karena Senkaku adalah bagian dari Formosa (Taiwan) (Adnyana, Mangku, & Windari, 2018). Tidak hanya itu, tentu saja

China memiliki alasan-alasan lainnya untuk menegaskan pengklaiman Senkaku dari pihak Jepang.

Sehubungan dengan konflik tersebut, ada Amerika Serikat yang berpihak membela Jepang. Jika ditelisik lebih jauh, kecenderungan dukungan Amerika Serikat terhadap Jepang atas kepemilikan Kepulauan Senkaku sebenarnya telah terlihat sejak dulu. Pemerintahan Eisenhower pada tahun 1957 menegaskan bahwa kedaulatan Kepulauan Ryukyu akan dikembalikan ke Jepang. Komitmen tersebut masih diikuti oleh Kennedy dengan menggunakan istilah “*residual sovereignty*” yaitu Amerika Serikat tidak akan mengalihkan kekuasaan kedaulatannya (administratif, legislatif dan yudikatif) atas Kepulauan Ryukyu kepada negara mana pun selain Jepang (Pedrozo, 2021). Selain itu, menurut laporan *Central Intelligence Agency* (CIA) memuat bahwa adanya dukungan kuat klaim Jepang atas Senkaku berdasarkan peta sejarah Jepang yang diterbitkan di Peking dan Taipei.

Namun, posisi Amerika Serikat dapat dikatakan cukup ambigu. Meskipun secara terang-terangan menyatakan komitmennya untuk membantu Jepang, namun tampaknya AS tetap berupaya mempertahankan sisi netralitasnya yang tidak begitu jelas. Padahal netral artinya tidak memihak siapa pun dan tidak terikat dengan pihak mana pun. Setelah sebelumnya berkomitmen dalam mendukung Jepang, selanjutnya Amerika Serikat memutuskan untuk bersikap netral dalam menyikapi perseteruan yang mulai memanas antara China dan Jepang. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan Richard Nixon

memiliki perhitungan strategis dalam hubungannya dengan Uni Soviet dan China. Pada Juni 1971, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meratifikasi *Okinawa Reversion Treaty* yang menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menambah hak hukum Jepang dan tidak dapat pula mengurangi hak-hak China atas persengketaan tersebut (Seokwo, 2002). Sejak saat itu, Amerika Serikat berturut-turut tetap mempertahankan netralitasnya..

Sikap netral tersebut mulai berubah kembali pada tahun 2012 di bawah pemerintahan Barack Obama ketika Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama di sekitaran Kepulauan Senkaku saat terjadi eskalasi konflik. Setahun sebelum pernyataan Obama, Clinton bahkan sempat menegaskan sikap AS yang tetap netral sejak 1971. Sikap AS inilah yang dinilai ambigu seperti tidak konsisten.

Hingga pada tahun 2014 saat konferensi pers di Tokyo bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Barack Obama justru secara ekplisit menyatakan dukungannya kepada Jepang di hadapan publik (Voice of America, 2014). Amerika Serikat siap untuk membela Jepang apabila mendapat serangan dari China. Amerika Serikat juga memperingatkan China untuk tidak mengambil langkah sepihak dalam mengubah *status quo* atas Kepulauan Senkaku. Meskipun begitu, Obama juga menekankan Amerika Serikat sebenarnya tidak memutuskan berada ada ‘posisi’ yang signifikan.

Sejak 2014, Trump terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Jepang yang memang sejalan dengan Obama dalam melihat masalah sengketa

tersebut. AS semakin mempererat hubungannya dengan Jepang khususnya pada bidang keamanan. AS menawarkan jaminan kepada Jepang untuk melindungi Jepang di bawah perjanjian keamanan aliansi AS-Jepang. Langkah tersebut dapat dikatakan cukup berani apalagi di tengah kabar diberlakukannya Undang-Undang kontroversial China yang secara eksplisit menyebutkan bahwa China akan menggunakan senjata api apabila ada kapal asing terdeteksi memasuki wilayah perairan China. Hal ini pun cukup menimbulkan kekhawatiran terhadap hubungan di antara mereka yang semakin memanas hingga berimplikasi di bidang-bidang lainnya.

Di atas sikap Amerika Serikat tersebut yang tampaknya sangat mendukung Jepang, ia masih tetap juga berusaha untuk memperlihatkan sisi netralnya. Namun Amerika Serikat belum bisa terlihat netral sepenuhnya dan selalu cenderung berpihak ke Jepang. Bahkan sekarang, Washington terus menekankan netralitasnya terhadap pulau-pulau tersebut. Namun, komitmen AS untuk membela Jepang dan kehadirannya yang berkembang di kawasan, menunjukkan bagaimana netralitas AS cenderung melayani kepentingan strategisnya di Asia Timur.

Sengketa Kepulauan Senkaku memang sangat rumit. Kesemrawutan kepentingan antar negara tersebut menunjukkan betapa dunia internasional penuh dengan persaingan antar negara dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensinya sebagai aktor hubungan internasional. Perseteruan antara Jepang dan China mengundang Amerika Serikat untuk ikut terlibat. Bukan tanpa alasan,

tentunya Amerika Serikat tidak ingin membuang waktu dan tenaga dengan cuma-cuma apabila tidak terselip kepentingan yang hendak dicapai dalam karena mau ikut dalam masalah rumit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya menarik untuk melihat lebih jauh sebenarnya apa alasan dibalik sikap Amerika Serikat yang cenderung mendukung Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Penulis menaruh ketertarikan untuk mengetahui kepentingan dan tujuan Amerika Serikat yang hendak dicapai dalam posisinya sebagai negara adidaya dalam dunia internasional.

Oleh karena itu, Penulis mengambil **“Kepentingan Amerika Serikat Dalam Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump”** sebagai judul penelitian skripsi Penulis.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada kepentingan dan dinamika sikap Amerika Serikat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan China yang juga dipengaruhi oleh hubungan keamanan AS-Jepang. Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis hanya akan memfokuskan pada era pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump yaitu dari tahun 2009-2022 ketika eskalasi konflik Senkaku naik-turun bersamaan dengan sikap AS yang juga naik-turun.

Berdasarkan paparan di atas, Penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan Amerikat Serikat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika sikap Amerika Serikat terhadap Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepentingan Amerikat Serikat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika sikap Amerika Serikat terhadap Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku Senkaku pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan acuan referensi mengenai kepentingan Amerika Serikat

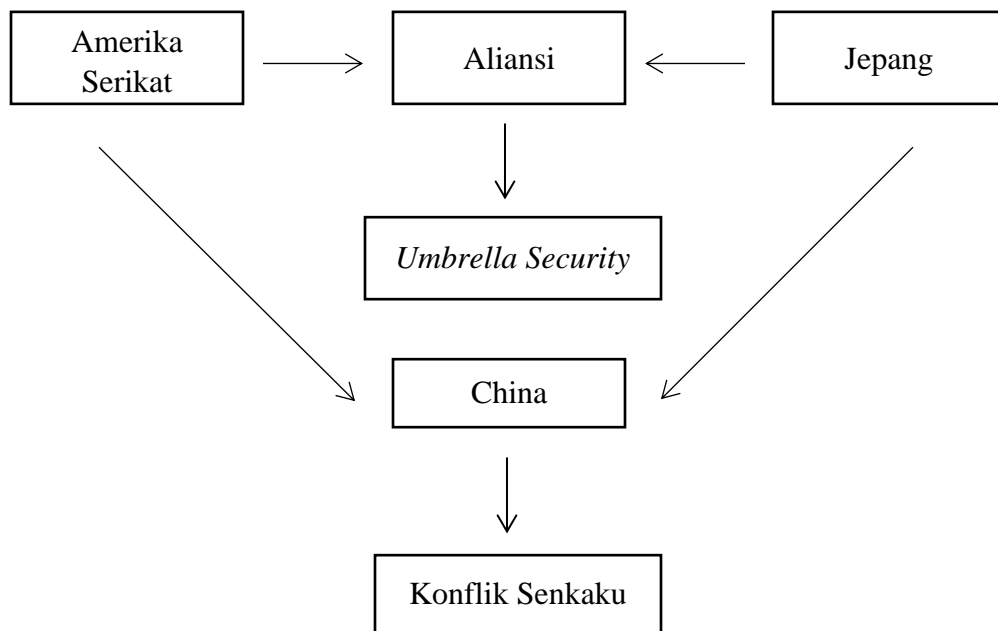
dalam sengketa Kepulauan Senkaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika sikap Amerika Serikat dalam dukungannya terhadap Jepang.

- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi umum yang dapat memperkaya wawasan terkait kepentingan suatu negara dalam konflik internasional.

E. Kerangka Konseptual

Berikut alur pemikiran yang menggambarkan penelitian ini.

Bagan 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: diolah oleh Penulis

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa konsep penelitian yang relevan dengan studi HI yaitu kepentingan nasional, aliansi, dan *umbrella security*. Konsep kepentingan nasional bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi sikap dan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap sengketa Senkaku antara Jepang dan China. Dari sikap itulah akan diteliti lebih jauh kepentingan apa yang hendak diwujudkan oleh AS dengan memanfaatkan posisinya sebagai negara adidaya yang juga sedang beraliansi dengan Jepang. Sehingga AS dapat terlibat langsung dalam sengketa tersebut dan memperlihatkan kecenderungannya dalam mendukung Jepang. Konsep ini juga bertujuan untuk menjelaskan kepentingan di balik mengapa dukungan yang diberikan AS kepada Jepang atas Senkaku nampak ambigu dan tidak konsisten.

Selanjutnya konsep aliansi merupakan bagian dari kepentingan nasional itu sendiri. Konsep ini menjelaskan bahwa salah satu pendorong utama suatu negara menjalin aliansi karena adanya rasa kebutuhan satu sama lain dalam masalah keamanan dan militer. Aliansi AS-Jepang telah ada sejak 1951 yang masih berlaku hingga saat ini. Sehingga konsep ini akan secara gamblang menggambarkan bagaimana hubungan keamanan AS-Jepang yang berimplikasi terhadap sengketa Senkaku. Sebagai konsep pendukung, Penulis juga menggunakan konsep *balance of power* karena aliansi AS-Jepang berhubungan dengan pengimbangan kekuatan terhadap China, khususnya di wilayah Asia Timur.

Berangkat dari konsep aliansi tersebut maka digunakalanlah konsep *umbrella security*. Penggunaan konsep *umbrella security* akan menyoroti lebih jauh nilai strategis hubungan antara AS dan Jepang dalam mencapai kepentingannya. Secara garis besar, *umbrella security* menggambarkan aliansi keamanan antar dua negara atau lebih dengan pembagian peran yang lebih spesifik dalam bidang keamanan. AS bersama Jepang bersatu dalam kerangka *umbrella security*, di mana AS berperan sebagai ‘payung perlindungan’ bagi Jepang terhadap ancaman China atas sengketa Senkaku.

Berikut uraian lebih lanjut terkait konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Charles Beard, kepentingan nasional (*national interest*) merujuk pada alasan suatu negara di belakang tujuan-tujuan dan ambisi-ambisinya terlibat dalam hubungan internasional (Burchill, 2005). Gagasan tersebut menggambarkan konsep kepentingan nasional sebagai motivasi atau justifikasi utama yang melatarbelakangi sikap suatu negara dalam lingkungan internasional. Dapat dikatakan bahwa salah satu determinan utama yang mendorong suatu negara terlibat dalam lingkungan global adalah karena kepentingan nasional.

Kepentingan nasional mungkin telah menjadi konsep yang paling populer dalam studi hubungan internasional. Selama negara-negara (*nation-state*) masih menjadi aktor dominan dalam HI maka kepentingan nasional

tetap akan menjadi konsep utama dan yang paling relevan dalam melihat isu-isu HI (Bakry, 2017). Konsep kepentingan nasional telah menjadi konsep yang khas dan sentral dalam studi HI sejak lama bahkan meskipun kajian HI telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan seiring bergantinya zaman. Hingga saat ini, para penstudi HI masih memfokuskan kepentingan nasional sebagai salah satu konsep HI yang tidak pernah luput dari isu-isu global.

Dapat dikatakan, terciptanya kebijakan luar negeri berangkat dari kepentingan nasional suatu negara. Konsep ini merupakan perangkat eksplanatori kunci (*key-explanatory tool*) dalam memahami hubungan internasional, khususnya analisis yang berkaitan dengan politik luar negeri dan diplomasi (Bakry, 2017). Hampir semua aspek dalam kajian HI selalu menyinggung soal kepentingan nasional. Kepentingan nasional masih menjadi konsep yang pokok dalam menjelaskan, mendeskripsikan, memprediksikan, atau membuat preskripsi tentang perilaku internasional (Coulombis & Wolfe, 1990).

Michael G. Roskin (1994) mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) *Importance*, terdiri atas *vital* dan *secondary*. *Vital interest* berkaitan dengan integritas teritorial dan *secondary interest* contohnya berkaitan dengan perlindungan warga negara di luar negeri.

- 2) *Duration*, terdiri atas *temporary* dan *permanent*. *Temporary interest* berupa tujuan yang hendak dicapai pada jangka waktu atau periode tertentu sedangkan *permanent interest* adalah kepentingan yang cenderung konstan dalam waktu jangka panjang.
- 3) *Specificity*, terdiri atas *specific* dan *general*. *Specific interest* merupakan kepentingan yang isunya relatif terbatas atau dalam cakupan wilayah yang tidak luas sedangkan *general interest* adalah kepentingan dalam cakupan wilayah yang luas.
- 4) *Compatibility*, terdiri atas *complementary* dan *conflicting*. *Complementary interest* mengacu pada kepentingan suatu negara yang saling melengkapi kepentingan nasional negara lain. Adapun *conflicting interest* merupakan kepentingan suatu negara yang menciptakan konflik dengan negara lain.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa konsep kepentingan nasional menjadi kunci utama motivasi suatu negara dalam mencapai tujuannya. Motivasi inilah yang mempengaruhi pola perilaku suatu negara dalam relasinya dengan negara lain. Kepentingan nasional juga bervariasi dan beragam tergantung dari urgensi masing-masing negara.

Kepentingan nasional sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara berangkat dari corak politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri dirumuskan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional

tersebut. Jika tidak ada kepentingan nasional yang jelas maka diibaratkan kapal tanpa nahkoda, artinya negara tanpa kepentingan nasional tidak akan mempunyai arah, tujuan, dan cita-cita apa yang berusaha diwujudkan. Kepentingan nasional juga menentukan bagaimana minat negara membangun relasi dan kerjasama antar negara dalam bentuk politik luar negeri. Di sinilah diperlukan *power* agar apa yang dikehendaki dapat tercapai. Lalu selanjutnya, politik luar negeri tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri yang diharapkan kepentingan nasional berhasil dicapai.

Penulis menilai perilaku Amerikat Serikat dengan ikut terlibat dalam sengketa tersebut merupakan salah satu bentuk dari *complementary interest*. Amerika Serikat berperan sebagai pihak yang melengkapi untuk mewujudkan kepentingan nasional Jepang. Jepang memiliki kepentingan untuk memiliki Kepulauan Senkaku dan Amerika Serikat ikut menjaga Jepang apabila sewaktu-waktu di serang oleh China. Tidak menutup kemungkinan AS juga mempunyai kepentingan-kepentingan nasional lainnya yang hendak dicapai melalui campur tangannya.

Selain itu, kepentingan Jepang-AS juga dapat dilihat dari segi *duration* yaitu *permanent interest* karena aliansi keamanan yang terbentuk sejak 1960 cenderung tidak berubah dalam jangka waktu yang panjang. Hubungan mereka masih terus dipertahankan dan terus mengalami perkembangan hingga

saat ini. Jadi bukan hanya kepentingan sementara yang hendak dicapai, tetapi kedua negara memang memiliki komitmen yang konstan dalam beraliansi.

2. Konsep Aliansi

Aliansi memainkan peran sentral dalam hubungan internasional karena dipandang sebagai bagian integral dari tata negara. Aliansi dibentuk antara dua atau lebih negara untuk melawan musuh bersama. Suatu negara mengharapkan sekutu untuk membantu secara militer dan diplomatik selama masa konflik terjadi. Komitmen yang dibuat oleh kerangka aliansi tersebut dapat bersifat formal atau informal yaitu (Dwivedi, 2012).

Menurut Morgenthau (1973), dalam teori *balance of power*, negara-negara membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan yang tumbuh dan memulihkan keseimbangan. Aliansi selalu merupakan sarana untuk mempertahankan keseimbangan. Dia membahas aliansi dalam hal cara/tujuan, yang berkaitan dengan perhitungan biaya/imbalan yang merupakan hasil dari *balance of power* antar negara. Negara menggunakan aliansi untuk meningkatkan keamanan mereka dengan menyeimbangkan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pihak yang berpotensi menjadi penantang kuat.

Dalam kaitannya dengan aliansi, terdapat dua aspek yang dapat membentuk aliansi itu sendiri, yaitu *balancing* dan *bandwagoning* (Waltz, 1979). *Balancing* didefinisikan sebagai upaya suatu negara untuk bersekutu dengan pihak lain untuk melawan ancaman yang ada. Dalam suatu konflik

internasional, negara dapat menyeimbangkan ancaman dengan mengandalkan sumber daya negara sendiri (bersifat internal) atau negara tersebut mencari negara lain atas dasar ketakutan yang sama lalu bersekeutu dengan mereka sebagai penyeimbangan eksternal. Sedangkan *bandwagoning* adalah bergabung dengan pihak yang lebih kuat demi perlindungan dan imbalan. Walt mendefinisikan *bandwagoning* sebagai 'penyelarasan dengan sumber bahaya'.

Penulis menilai hubungan erat antara Jepang dan AS didasarkan atas aliansi yang telah terbentuk sejak lama dengan berfokus pada faktor *balancing*, bukan *bandwagoning*. Para ahli teori klasik berpendapat bahwa aliansi adalah hasil dari *balance of power* (BoP) antar negara. Para ahli revisionis berpendapat bahwa negara menggunakan aliansi untuk meningkatkan keamanan mereka dengan menyeimbangkan diri terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh (berpotensi) menjadi penantang kuat. Ketika ada ketidakseimbangan ancaman, negara-negara akan membentuk aliansi atau meningkatkan upaya internal mereka untuk mengurangi kerentanan mereka.

Dalam kaitannya dengan kasus sengketa Senkaku, diketahui bahwa pada tahun 1960, AS dan Jepang telah menyepakati *Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang pada akhirnya menciptakan rasa saling menguntungkan satu sama lain. Aliansi berkaitan erat dengan adanya bantuan militer dari negara lain dalam menghadapi ancaman dari luar. Mereka yang berusaha membentuk suatu aliansi dapat diasumsikan bahwa mereka tidak

begitu mampu apabila hanya memobilisasikan kemampuan sendiri. Dapat dikatakan Jepang dan AS membuat komitmen dalam rangka menghadapi masalah luar negeri yang sama atau secara bersama hendak mencapai tujuan tersebut. Dari aliansi itulah rasa keamanan bisa tercipta dan ancaman bisa diseimbangkan.

Apabila suatu negara memiliki kekuatan ofensif yaitu kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau keutuhan wilayah negara lain, maka negara dengan kemampuan ofensif yang besar lebih mungkin untuk memprovokasi aliansi daripada mereka yang tidak mampu menyerang. Negara-negara yang dipandang agresif cenderung memprovokasi orang lain untuk mengimbangi mereka.

Secara ekonomi, Jepang mungkin memiliki posisi yang kuat di dunia. Namun dari segi pemeliharaan keamanan tak dapat dipungkiri Jepang masih cukup bergantung pada Amerika Serikat. Melalui aliansi itulah Jepang bisa berlindung di bawah sumber daya besar yang dimiliki Amerika Serikat.

Seiring berjalannya waktu, aliansi keamanan Jepang-AS pun mulai mengalami perkembangan pada fokus tujuannya. Pada awalnya berfokus pada pertahanan keamanan Jepang kemudian semakin berkembang sebagai upaya berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional khususnya di wilayah Asia Timur. Berbagai peningkatan kerjasama juga terus dilakukan dan masih berlangsung hingga saat ini. Jika dihubungkan mencuatnya sengketa Kepulauan Senkaku Jepang-China ini berpengaruh pada

dinamika keamanan di wilayah Asia Timur, atas dasar itulah Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk melindungi Jepang sekaligus berusaha untuk memelihara stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Timur.

3. Konsep *Umbrella Security*

Dalam studi HI, aliansi yang terjalin antara AS dan Jepang merupakan salah satu bentuk dari *umbrella security*. Dalam laporan *Strategic Studies Institute* (SSI) dijelaskan bahwa istilah “*umbrella*” sendiri mengacu pada penyediaan keamanan sebagai bentuk penghalangan terhadap elemen (yang dianggap sebagai ancaman) lain (Wortzel, 1996). Secara singkat, *umbrella security* tidak bersifat “*one-size-fits-all*” melainkan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan ‘unik’ masing-masing klien. Klien yang dimaksud dalam hal ini merupakan negara yang berada di bawah bantuan keamanan oleh negara lain. Para ahli menyoroti bahwa bentuk aliansi semacam ini biasanya bersifat statis dan dianggap sebagai tambahan pelindung dari preferensi strategi besar yang sudah lama ada (Lee D. Y., 2021). Seperti halnya yang terjadi antara Jepang dan AS, di mana AS bertindak sebagai pihak pelindung.

Salah satu dimensi yang perlu dipenuhi dalam *umbrella security* adalah kredibilitas jaminan (Lee D. Y., 2021). Artinya, pihak pelindung harus meyakinkan klien bahwa ia akan menghormati komitmen keamanan yang dijanjikannya kepada perlindungan klien jika terjadi perang. Umumnya, klien

yang berbeda akan berada di lingkungan yang berbeda pula. Dengan demikian, tingkat komitmen keamanan yang diperlukan untuk klien ditentukan oleh jenis (keparahan) ancaman eksternal yang dihadapi klien. Ketika pihak klien dihadapkan dengan situasi ancaman yang sangat mengerikan, jaminan keamanan yang kuat dan solid akan diminta untuk (kembali) meyakinkan klien. Sebaliknya, ketika klien menghadapi ancaman ringan, komitmen di tingkat yang relatif lebih rendah akan dibutuhkan.

Agresi eksternal yang dilakukan oleh pihak pelindung (patron) yang memiliki kepentingan vital dapat menyebabkan resiko yang signifikan terhadap kepentingan nasional patron. Resiko ini juga dapat dirasakan oleh negara sebagai pihak yang dilindungi. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan patron dalam keamanan klien, semakin besar komitmen patron untuk melindungi kepentingan bersama yang dimiliki klien. Hal ini mengacu pada bagaimana khalayak dalam patron dan negara klien (misalnya, publik, kongres, dan departemen pemerintah) mempengaruhi kebijakan luar negeri patron maupun pihak klien.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya sejak lama telah memiliki *interest* dan strategi khususnya di wilayah Asia. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh *Secretary of Defense Cheney* mengenai *National Security Strategy* pada tahun 1992, bahwa AS memberikan jaminan kepada sekutu regional di Asia yang akan dipandu oleh enam prinsip yaitu:

“(1) assurance of U.S. engagement in Asia and the Pacific, (2) a strong system of bilateral security arrangements, (3) maintenance of modest but capable forward deployed U.S. forces, (4) sufficient base structure to support those forces, (5) a request that Asian allies assume greater responsibility for their own defense, and (6) complementary defense cooperation.”

Tampaknya ikatan *umbrella security* antara Jepang dan Amerika Serikat memiliki dasar yang kuat mengapa kemudian aliansi tersebut terus dipertahankan hingga saat ini. Namun tetap saja ada harga atau resiko yang perlu ditanggung dalam hubungan semacam ini karena ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan.

Misalnya banyak pihak yang menilai Jepang sebagai negara yang dilindungi seperti telah kehilangan ‘identitas nasional’ dan terlalu ketergantungan kepada AS. Sheila A. Smith dalam bukunya yang berjudul *Japan Rearmed* menggambarkan “Jepang tidak berasal dari Tokyo, Okinawa, Sapporo, Osaka, Kyoto, atau di mana pun di Jepang, melainkan dari dan berakhir di Washington”. Padahal Jepang memiliki salah satu militer Asia yang paling berteknologi maju namun masih berjuang untuk menggunakan kekuatannya sebagai instrumen kebijakan nasional. Smith juga menilai ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang yaitu aliansi keamanan AS-Jepang, politik domestik, dan persepsi ancaman eksternal.

AS pun juga pasti menerima resikonya sebagai negara pelindung Jepang. Perjanjian Keamanan Jepang-AS tahun 1960 semakin mengukuhkan

pernikahan antara kedua negara yang kecil kemungkinannya untuk dilepaskan. AS seperti menyiapkan strategi ‘perubahan sikap’ untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga dukungannya terkesan ambigu. Berdasarkan kerangka konseptual ini, bisa jadi resiko itulah yang menciptakan sikap ambiguitas AS dalam dukungannya terhadap Jepang dalam konflik Senkaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Metode kualitatif menggunakan sumber data langsung, deskriptif, proses lebih di pentingkan daripada hasil, dan cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Penelitian jenis kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus dan pengalaman personal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk membantu dalam mengembangkan penelitian. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi literatur/studi kepustakaan. Melalui teknik studi kepustakaan, Penulis akan mengumpulkan

data dari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian Penulis. Literatur yang akan digunakan sebagai sumber bacaan berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, berbagai situs di internet maupun laporan resmi yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh Penulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, artikel, surat kabar, dan internet.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah ada dikumpulkan akan diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data kuantitatif juga diperlukan sebagai data pelengkap data yang sudah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Orientasi politik luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional. Istilah ini menandakan pedoman dasar dari semua tindakan yang dilakukan negara dalam kebijakan eksternalnya. Dalam kepentingan nasional, tidak hanya satu kepentingan yang dikejar tetapi terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, yang bersama-sama dapat menjamin keamanan dan kemakmuran, kondisi yang baik dari aktor negara (Metea, 2020).

Samuel Huntington (2004) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai barang publik yang menjadi perhatian semua orang atau sebagian besar warga negara; dan kepentingan nasional yang vital adalah kepentingan yang membuat mereka rela menumpahkan darah dan menghabiskan kekayaan mereka untuk mempertahankannya. Kepentingan nasional biasanya menggabungkan keamanan dengan masalah materi, di satu sisi, dan masalah moral dan etika, di sisi lain. Kepentingan yang termasuk dalam kategori kepentingan nasional merupakan ekspresi dari nilai-nilai yang dicirikan oleh tujuan-tujuan yang nyata, yang harus dicapai oleh aktor-aktor negara. Setelah menetapkan tujuan maka sarana untuk mencapainya dipilih, bersama dengan itu merupakan cara-cara efektif untuk mencapainya. Prosedur ini dipastikan jika inisiatif kebijakan luar negeri diluncurkan oleh aktor yang bersangkutan.

Ileana-Gentilia Metaea mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) nilai-nilai fundamental integritas teritorial, kemerdekaan, kedaulatan dan nilai-nilai yang tidak dapat dinegosiasikan;
- 2) hal-hal yang dapat dinegosiasikan meskipun penting, misalnya perjanjian pengendalian senjata dan/atau perlucutan senjata, dalam batas menjaga keseimbangan;
- 3) yang sering menjadi topik pembicaraan negosiasi, seperti hak navigasi, dan lainnya.

Dalam *paper* yang diterbitkan oleh *Center for Science and International Affairs* tahun 1996 mengenai *national interests of the United States* yaitu (The Commission on America's National Interests, 1996):

“preventing, combating, and reducing the threat of chemical, biological, and nuclear weapons in the United States, preventing the emergence of an opposing upper power in Europe or Asia; preventing the development of a great power hostile to US borders or in control of the oceans; preventing the collapse of one of the major global systems: trade, financial markets, energy supply or the environment; ensuring the survival of US allies.”

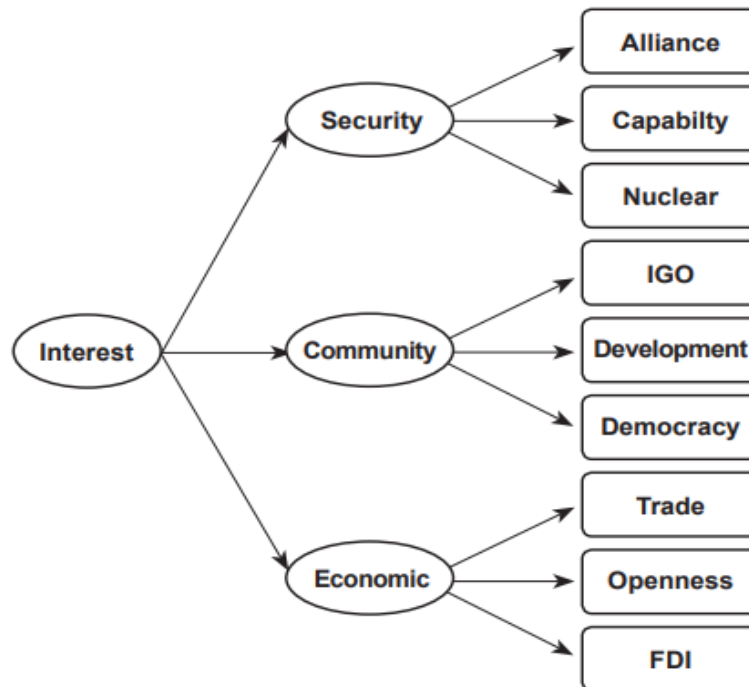
Dari perspektif ini, harus dipertimbangkan bahwa semua yang disebutkan di atas, menurut sudut pandang realitis, melayani kepentingan utama Amerika Serikat, yaitu pelestarian dan jaminan keamanan nasional. Dokumen tersebut juga mencakup kepentingan-kepentingan lainnya yang masuk ke dalam kategori-kategori berikut:

- 1) *Vital interests*, yaitu kepentingan yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup negara dan menjamin keamanan bangsa.
- 2) *Extremely important interests*, yaitu kepentingan yang jika dikompromikan akan secara serius, tetapi tidak secara permanen mempengaruhi stabilitas pemerintah AS untuk memastikan kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional. Kategori ini meliputi pencegahan, penangkalan, dan non-proliferasi senjata biologis dan nuklir di mana pun di dunia; mencegah penyebaran regional senjata nuklir, biologi dan kimia serta sistem transportasinya; mempromosikan penerimaan aturan hukum internasional dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara damai; mencegah munculnya hegemoni regional di kawasan, melindungi kawan dan sekutu AS dari agresi eksternal yang signifikan, dan lain-lain. Mengkompromikan kepentingan-kepentingan penting seperti itu dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi kemampuan AS untuk memajukan kepentingan nasionalnya yang vital.
- 3) *Important interest*, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran HAM secara masif negara di negara lain sebagai bagian dari kebijakan pemerintah; mempromosikan pluralisme politik, kebebasan, demokrasi di negara-negara, mencegah dan mengakhiri konflik di wilayah geografis yang tidak memiliki kepentingan strategis tanpa menimbulkan biaya besar, dan lain-lain.
- 4) *Secondary interests*, yaitu *preferable* tetapi tidak membawa kepentingan utama bagi stabilitas pemerintah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan vital. Kategori kepentingan yang terakhir meliputi

penyeimbangan defisit perdagangan; memperluas demokrasi; menjaga integritas teritorial, dan sistem politik negara lain, dan lainnya. Dengan demikian, semua kategori kepentingan nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan AS, termasuk dalam kategori pertama yaitu kepentingan nasional vital yang telah ditentukan oleh paradigma hubungan internasional yang realistik, sebagai kelangsungan hidup dan keamanan bangsa.

Charles Chong-Han Wu (2017) mengilustrasikan *interest* ke dalam tiga jenis model utama yang disusun dalam **Bagan 2** berdasarkan pada argumen teoritis.

Bagan 2. Model Faktor Kepentingan Nasional



Sumber: Charles Chong-Han Wu, Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling

Negara menghadapi masalah global yang khas sehingga pemimpin negara perlu mengadopsi kebijakan yang relevan untuk menangani masalah tersebut. Untuk menggunakan contoh sederhana dalam mengilustrasikan klasifikasi, kita perlu menyoroti apakah suatu negara yang meningkatkan pembelanjaan militernya bergantung pada apakah negara tersebut lebih memilih untuk mengatasi tujuan/masalah keamanan atau ekonominya. Jika negara lebih memilih fokus pada urusan keamanan, maka negara akan berjuang untuk meningkatkan kemampuan nasional atau membangun lebih banyak aliansi defensif (Wu, 2017).

Jutta Weldes (1996) menjelaskan terdapat dua alasan kenapa kemudian kepentingan nasional penting bagi politik internasional. Pertama, melalui konsep kepentingan nasional, pembuat kebijakan dapat memahami tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara. Kedua, kepentingan nasional berfungsi sebagai perangkat retorik yang melaluinya legitimasi dan dukungan politik untuk tindakan negara dapat dihasilkan. Karena kepentingan nasional dalam praktiknya memainkan peran vital ini dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dan dengan demikian dalam menentukan tindakan negara, maka jelas harus menempati tempat yang menonjol dalam perhitungan politik internasional.

B. Aliansi

Dalam hubungan internasional, aliansi adalah perjanjian formal antara dua negara atau lebih untuk saling mendukung jika terjadi perang. Aliansi kontemporer memberikan tindakan gabungan dari dua atau lebih negara merdeka

dan umumnya bersifat defensif, mewajibkan sekutu untuk bergabung jika satu atau lebih dari mereka diserang oleh negara atau koalisi lain . Meskipun aliansi mungkin bersifat informal, mereka biasanya diformalkan oleh sebuah perjanjian aliansi, klausul yang paling kritis yang didefinisikan sebagai *casus foederis*, atau keadaan di mana perjanjian mewajibkan sekutu untuk membantu sesama anggota (Haglund, 2023).

Dalam politik internasional, aliansi merupakan serikat untuk aksi bersama dari berbagai kekuatan atau negara. Contohnya termasuk aliansi kekuatan Eropa dan AS melawan Jerman dan sekutunya selama Perang Dunia II dan aliansi negara-negara NATO melawan Uni Soviet dan sekutunya selama Perang Dingin . Banyak aliansi bersandar pada prinsip keamanan kolektif, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Aliansi besar yang dibentuk setelah Perang Dunia II termasuk Pakta ANZUS, Liga Arab, ASEAN, Organisasi Negara-Negara Amerika, Organisasi Perjanjian Asia Tenggara, dan Pakta Warsawa (Britannica, 2023).

Mushahid Hussain (1979) menjelaskan Prinsip keamanan kolektif menganggap pemeliharaan perdamaian sebagai tanggung jawab bersama dan melibatkan komitmen untuk menghentikan agresi melalui tindakan bersama, diabadikan dalam Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Piagam PBB juga menjunjung tinggi prinsip ini. Prinsip ini mensyaratkan kepentingan umum dari semua anggota masyarakat internasional dalam menentang agresi oleh salah satu dari mereka. Semua negara dianggap memiliki kepentingan dalam pemeliharaan

perdamaian dan oleh karena itu, harus memiliki tanggung jawab bersama dalam menentang pelanggaran perdamaian. Di sisi lain, aliansi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi yang sempit dan terbatas. Pelestarian perdamaian mungkin penting tetapi belum tentu merupakan penentu yang menentukan perilaku aliansi. Aliansi harus diarahkan melawan negara tertentu (Friedman, Bladen, & Rosen, 1970).

Pembentukan aliansi adalah hasil interaksi yang patut ditiru antara unit-unit politik berdaulat yang digerakkan oleh kepentingan untuk mendominasi atau menyeimbangkan kekuasaan. Menurut Stephen Walt, aliansi dibentuk oleh negara-negara untuk melindungi diri dari negara atau koalisi yang sumber dayanya lebih unggul yang berpotensi menimbulkan ancaman (Walt, 1987). Negara-negara yang lebih lemah pada umumnya menjalin aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan. Negara-negara yang lebih kuat terkadang membantu aliansi untuk ‘meningkatkan bagian mereka dari kekuatan dunia’ (Mearsheimer, 2001). Selain itu, kita tidak mungkin membicarakan hubungan internasional tanpa adanya aliansi (Liska, 1962).

Bagi Morgenthau (1960), aliansi adalah sebuah proses untuk memanipulasi ekuilibrium sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan ekuilibrium. Aliansi juga merupakan asosiasi formal negara-negara untuk menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan militer, yang dimaksudkan untuk keamanan atau perluasan anggota mereka terhadap negara-negara tertentu lainnya, terlepas dari apakah negara lain ini secara jelas diidentifikasi atau tidak.

Tujuan utama dari sebagian besar aliansi adalah untuk menggabungkan kemampuan anggota dengan cara memajukan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, setiap negara memiliki kebijakan aliansi yang secara formal dinegosiasikan dengan negara-negara lain di dunia. Jadi aliansi adalah kesepakatan yang dibuat oleh negara, memiliki orientasi yaitu mereka ditujukan di luar keanggotaan mereka sendiri.

Aliansi adalah instrumen untuk mengelola *security dilemma* (Waltz, 1979). Aliansi meningkatkan kemungkinan yang dirasakan dari perilaku yang diharapkan menjadi kenyataan. Dengan demikian mereka membantu mengurangi ketidakpastian di antara negara-negara. Aliansi meningkatkan persepsi secara positif dalam artian mengurangi ketidakpastian tentang apa yang akan dilakukan oleh negara lain. *Security dilemma* (dilema bahwa semakin banyak negara mencari keamanan, semakin tidak aman mereka jadinya) memaksa negara untuk membentuk aliansi baru atau memperkuat aliansi yang sudah ada (Mearsheimer, 2001). Faktanya aliansi tidak boleh mencegah atau mendorong perang atau perdamaian sama sekali; sebaliknya, aliansi berfungsi sebagai alat bagi negara untuk mengatur hubungan.

Secara khusus Liska dan Morgenthau membahas masalah aliansi dalam hal keseimbangan kekuatan, meskipun penerapan konsep ini agak berbeda. Stephen Walt berpendapat bahwa karya Hans Morgenthau terutama menggunakan bukti subyektif untuk mendukung poin-poinnya dalam teks landasan politik di antara bangsa-bangsa dan menegaskan kembali perlunya keseimbangan fungsi

kekuasaan dalam sistem beberapa negara. Selain itu, Walt menafsirkan semakin banyak kesamaan antar negara tertentu maka semakin besar kemungkinan mereka akan beraliansi (Walt, 1987).

Terlepas dari ketidaksepakatan Walt dengan karya Morgenthau dan Liska karena kurangnya fokus, premis Sergey Kireyev dalam hal pembentukan aliansi berpendapat bahwa menyeimbangkan kekuatan melawan musuh potensial jauh lebih dapat diterima daripada '*bandwagoning*', dan solidaritas ideologis biasanya merupakan faktor yang lebih kuat ketika tingkat ancaman keamanan internasional juga tinggi (Kireyev, 2004).

Morgenthau memandang aliansi sebagai kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam sistem multi-negara internasional. Menurut hipotesis itu, negara-negara yang berusaha meningkatkan kekuatan mereka sendiri di arena dunia dapat menggunakan tiga cara yaitu *a build-up of armaments*, *adding their influence to that of other states*, or *preventing the adversary from obtaining the power of other states*. Terlepas dari pilihan antara dua opsi terakhir, negara yang memilih salah satu dari jalur tersebut akan menjalankan kebijakan berorientasi aliansi. Selanjutnya, Morgenthau juga membuat perbedaan antara keamanan kolektif dan aliansi perimbangan kekuatan. Jika sistem perimbangan kekuatan mendapatkan kepentingan nasional individu sebelum adanya tindakan bersama, pendirian keamanan kolektif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kolektif, terlepas dari kepentingan nasional individu.

C. Umbrella Security

Dalam laporan *Strategic Studies Institute* (SSI) dijelaskan bahwa istilah “*umbrella*” sendiri mengacu pada penyediaan keamanan sebagai bentuk penghalangan terhadap elemen (yang dianggap sebagai ancaman) lain (Wortzel, 1996). Secara singkat, *umbrella security* tidak bersifat “*one-size-fits-all*” melainkan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan ‘unik’ masing-masing klien. Klien yang dimaksud dalam hal ini merupakan negara yang berada di bawah bantuan keamanan oleh negara lain.

Untuk meyakinkan pihak klien akan keamanannya, negara patron (pelindung/penyedia keamanan) harus menunjukkan kredibilitas komitmen keamanannya kepada klien. Artinya, patron harus meyakinkan klien bahwa ia akan menghormati komitmen keamanan yang dijanjikannya untuk perlindungan klien pada saat perang. Secara umum, klien yang berbeda untuk dihadapkan pada lingkungan ancaman yang berbeda pula. Dengan demikian, tingkat komitmen keamanan yang diperlukan oleh klien ditentukan oleh jenis (keparahan) ancaman eksternal yang dihadapi klien. Ketika klien dinilai menghadapi ancaman yang sangat mengerikan, jaminan keamanan yang sangat kuat dan solid akan diperlukan untuk (kembali) meyakinkan klien. Sebaliknya, ketika klien dinilai untuk menghadapi ancaman ringan, komitmen yang relatif lebih rendah akan dibutuhkan (Lee D. Y., 2021).

Perlindungan keamanan berfokus pada tujuan yang dicari oleh penyerang potensial terhadap klien ketika menilai tingkat ancaman yang ditimbulkan. F.

Gregory Gause III menemukan bahwa penilaian ancaman, negara memprioritaskan niat agresif atas faktor material dan geografis karena ancaman yang berasal dari niat agresif lebih menonjol daripada yang didasarkan pada dua faktor terakhir. Secara lebih luas, niat negara diyakini terkait erat dengan tujuannya (Gause, 1987).

Serangan musuh terhadap klien didorong oleh salah satu dari tiga tujuan, yaitu (Lee D. Y., 2021):

- 1) *political absorption*, yaitu mengacu pada pengejaran musuh untuk mengintegrasikan klien ke dalam sistem politiknya dengan merampas hak kedaulatan dan penentuan nasib sendiri;
- 2) *territorial annexation*, yaitu mengacu pada upaya musuh untuk merebut atau merebut kembali wilayah yang disengketakan klien;
- 3) *governmental degradation*, yaitu mengacu pada upaya musuh untuk melemahkan otoritas negara klien atau menghalangi pemerintahan yang efektif. Untuk dua alasan, penyerang potensial yang mengincar dua tujuan terakhir dianggap kurang mengancam daripada yang mengincar tujuan pertama. Pertama, zona konflik cenderung terkurung dalam wilayah geografis yang terbatas ketika musuh menyerang untuk dua tujuan terakhir. Agresi territorial umumnya hanya ditujukan pada kepemilikan wilayah yang disengketakan dan bagian tertentu dari wilayah sasaran. Demikian pula degradasi pemerintah biasanya berusaha untuk melemahkan atau mengganggu otoritas domestik negara. Sebaliknya, integrasi politik memerlukan

perampasan yuridiksi target atas seluruh wilayahnya. Kedua, agresi bersenjata yang berkaitan dengan dua tujuan terakhir cenderung melibatkan intensitas konflik dan permusuhan yang lebih rendah. Konflik territorial cenderung damai, negosiasi, tawar-menawar, dan resolusi melalui arbitrase institusional internasional dan mediasi pihak ketiga.

Ketika kelangsungan hidup klien tidak terancam, patron akan merasa tidak perlu memberikan jaminan untuk meyakinkan klien. Yang pasti, semakin banyak komitmen keamanan yang dinikmati, semakin terjamin (kembali) posisi klien. Namun bagi patron, komitmen berlebihan seperti itu tidak diinginkan. Komitmen kuat negara patron dapat merangsang oportunisme dan gerak klien yang terlalu bersemangat yang bisa mengobarkan permusuhan berisiko tinggi terhadap musuh. Pada akhirnya komitmen berlebihan dapat mengakibatkan spiral eskalasi dan pecahnya konflik militer antara klien dan musuh, yang dapat pula menjebak patron dalam peperangan yang tidak diinginkan (Benson, 2012).

Tentu saja, pihak klien tidak mungkin tidak menerima persepsi ancaman serius dari pihak patron dan komitmennya yang terkendali, lalu mengklaim bahwa patron meremehkan ancaman yang dihadapi klien. Selanjutnya, klien dapat mengejar opsi alternatif seperti mencari perlindungan dari pihak lain. Alternatif ini, bagaimana pun cenderung tidak layak, digagalkan, atau lebih berbahaya bagi keamanan klien daripada tetap berada di bawah payung keamanan pihak pelindung. Pada akhirnya, klien umumnya

akan menerima tingkat komitmen patron meskipun tidak sepenuhnya (Gerzhoy, 2015).

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu terkait kepentingan Amerika Serikat dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu ialah laporan penelitian untuk CNA *Maritime Asia Project: Workshop on Japan's Territorial Disputes Panel on the Senkaku/Diaoyutai Islands Dispute: A Regional Flashpoint* yang ditulis oleh Alan D. Romberg dengan judul “*American Interests in the Senkaku/Diaoyu Issue, Policy Considerations*”, yang disusun pada 11 April 2013.

Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada fokus rentang waktu yang diteliti. Alan D. Romberg hanya berfokus pada posisi dan kepentingan Amerika Serikat pada era Perang Dunia II lalu perubahan sikap AS yang terjadi pada administrasi Nixon dan ketika dikembalikannya Okinawa kepada Jepang, serta merekomendasikan opsi sikap yang seharusnya diambil oleh AS atas dasar pertimbangan hubungan AS dengan China maupun Jepang terhadap situasi pada saat itu. Sedangkan Penulis berfokus pada era pemerintahan Presiden Donald Trump dan Presiden Barack Obama dengan sedikit kilas balik pada era Perang Dunia II sebagai pengantar penjelasan-penjelasan selanjutnya serta lebih berfokus pada faktor-faktor apa yang mendorong dinamika sikap AS tersebut.

Selain itu, ada pula penelitian terkait yang ditulis oleh Alana Camoça Gonçalves de Oliveira dengan judul “*Assessing Neutrality: The United States’*

Role in the Diaoyu Islands Dispute” yang disusun pada 24 Juni 2022. Oliveira berfokus pada netralitas dan keambiguan sikap Amerika Serikat dari waktu ke waktu sejak era Perang Dunia II hingga saat ini atas keterlibatannya dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu sedangkan Penulis berfokus pada kepentingan dan faktor-faktor apa saja yang ada di balik netralitas dan keambiguitas sikap Amerika Serikat tersebut terkhusus pada era pemerintahan Obama dan Trump sebagai pokok pertanyaan penelitian.